



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 481 / 438.1.1.3 / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
ATAS NAMA PT. BAITY JANNAH REALTY
DI DESA DAMARSI, KECAMATAN BUDURAN,
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap Dampak Lalu Lintas yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengoperasian kawasan, perlu adanya Analisis Dampak Lalu Lintas ;
- b. bahwa terhadap Dokumen Analisis Dampak lalu Lintas Pembangunan Perumahan atas nama PT. BAITY JANNAH REALTY yang berlokasi di Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai laporan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 551.21/395/438.5.13/2021 Tanggal 31 Mei 2021, dengan hasil telah memenuhi persyaratan minimal manajemen dan rekayasa lalu lintas, maka perlu memberikan persetujuan terhadap dokumen dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan atas nama PT. BAITY JANNAH REALTY yang berlokasi di Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 8 Seri E) ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas tanggal 29 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan atas nama PT. BAITY JANNAH REALTY yang berlokasi di Desa Damarsi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seluas ± 42.751 M²;
- KEDUA** : Dokumen sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berbentuk Laporan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban pemegang Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum kesatu di dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa :
1. Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sesuai spesifikasi teknis dari kementerian Perhubungan meliputi :
 - Rambu Peringatan Hati-hati sebanyak 2 (dua) unit;
 - Rambu Batas Kecepatan sebanyak 2 (dua) unit;
 - Rambu Dilarang Masuk sebanyak 9 (sembilan) unit;
 - Rambu Mengikuti Arah yang Ditunjuk sebanyak 9 (sembilan) unit;
 - Rambu Peringatan Simpang Empat sebanyak 2 (dua) unit;
 - Rambu Petunjuk Parkir sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Rambu Petunjuk Putar Balik sebanyak 4 (empat) unit.

2. Menyediakan Traffic cone sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk kondisi situasional.
3. Memasang Warning Light 2 (dua) aspek 2 (dua) arah sesuai gambar teknis.
4. Memasang papan himbauan/peringatan, rambu hati-hati dan rotary lamp (portable) selama masa pembangunan sesuai gambar teknis.
5. Memasang speed trap sesuai gambar teknis.
6. Menyediakan Hydrant sesuai gambar teknis.
7. Membuat akses masuk/keluar dengan lebar minimal 15 (lima belas) meter dengan radius tikung minimal 15 (lima belas) meter.
8. Garis Sempadan Pagar (GSP), dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyediakan Papan Informasi Lokasi Blok Perumahan dalam kawasan.
10. ROW jalan dalam kawasan perumahan untuk Kavling perumahan berhadapan dan untuk Kavling satu sisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Setiap unit rumah disediakan lahan parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) dan dilarang parkir di badan jalan.
12. Menyiapkan drainase jalan dan drainase dalam kawasan menuju ke saluran pembuang berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
13. Memasang Alat Penerangan Jalan (APJ) sesuai gambar teknis berkoordinasi dengan Instansi terkait.
14. Membuat pos penjagaan dengan menempatkan minimal 3 (tiga) orang per shif petugas pengatur lalu lintas yang bersertifikat minimal gada pratama (yang dikeluarkan oleh POLRI) dengan kelengkapan rompi keselamatan berkoordinasi dengan Polsek setempat.
15. Memasang CCTV untuk pemantauan mengarah keluar dan kedalam kawasan serta menginformasikan *IP address* ke instansi terkait.
16. Kendaraan operasional angkut urugan dan material harus lulus uji kir.
17. Kendaraan operasional angkut urugan dan material harus masuk dalam kawasan dan dilarang berhenti di badan jalan.
18. Roda kendaraan operasional angkut urugan dan material harus dalam keadaan bersih pada saat keluar dari lokasi.
19. Kendaraan operasional angkut urugan dan material dengan Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) sesuai kelas jalan dengan dimensi standart (bak tertutup).
20. Jam operasional kendaraan angkut urugan dan material dilaksanakan di luar jam sibuk 06.00 s/d 21.00 WIB.

21. Dilarang memfasilitasi pedagang kaki lima di depan lokasi.
22. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Polsek setempat sebelum dan sesudah melaksanakan pembangunan.
23. Membuat surat pernyataan bahwa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rekomendasi ini dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum operasional dan melaporkan ke Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo.
24. Dilarang melaksanakan kegiatan operasional sebelum izin-izin yang dipersyaratkan dikeluarkan oleh Instansi terkait.
25. Dalam hal dilakukan pengembangan, maka selaku pemrakarsa diwajibkan untuk mengajukan revisi Analisis Dampak Lalu Lintas.
26. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini merupakan kewajiban pemrakarsa dan dalam pelaksanaannya dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.
27. Akan dilakukan evaluasi oleh tim terhadap pemenuhan rekomendasi dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, secara berkala sesudah lokasi dioperasikan yang di fasilitasi oleh pemrakarsa.

- KEEMPAT** : Bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan dan warna rambu lalu lintas, Lampu *Warning Light*, Marka yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- KELIMA** : Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, Lampu *Warning Light*, Marka yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud *diktum* ketiga dilakukan berdasarkan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan;
- KEENAM** : Kewajiban sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengoperasian kawasan;
- KETUJUH** : Pemrakarsa sanggup untuk memenuhi rekomendasi dokumen andalalin dan pendapat tim penilai dokumen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;

- KEDELAPAN : Instansi terkait melakukan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan sesuai persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan jika tidak bisa memenuhi kewajiban yang telah direkomendasikan maka ijin operasional akan ditinjau kembali dan/atau pencabutan ijin-ijin yang telah diterbitkan;
- KESEMBILAN : Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, selanjutnya dalam jangka waktu lima tahun dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR